



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 1-11

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Eksplorasi Faktor Pendorong Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua: Perspektif Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar

Sukriyadi¹, Abdul Halik², Siti Mujanah³

¹Universitas Lelemuku Saumlaki

^{2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹sukriyadi.unlesa@gmail.com, ²halik@untag-sbv.ac.id, ³sitimujanah@untag-sbv.ac.id

Abstrak

Pelaporan keuangan berbasis akrual merupakan pilar utama reformasi akuntansi sektor publik yang bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan fiskal. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Tanimbar, penerapan pelaporan akrual masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor pendorong keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan berbasis akrual dari perspektif pemerintah daerah kepulauan. Pendekatan *mixed method* digunakan dengan kombinasi survei kuantitatif terhadap aparatur pengelola keuangan daerah dan wawancara mendalam dengan auditor internal serta pejabat akuntansi daerah. Variabel utama yang dianalisis mencakup kompetensi aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keterandalan laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi dan dukungan kelembagaan berperan dominan dalam memastikan ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Selain itu, kondisi geografis kepulauan menuntut strategi adaptif dalam tata kelola keuangan publik, terutama melalui optimalisasi sistem digital dan penguatan kapasitas SDM. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan *governance readiness* dan sinergi kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan implementasi akuntansi akrual di lingkungan pemerintah daerah. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pelaporan keuangan berbasis akrual yang efektif di wilayah kepulauan, diperlukan sinergi antara kompetensi aparatur, dukungan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Pelaporan Keuangan Akrua, Keterandalan, Ketepatanwaktuan, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Kepulauan Tanimbar

1. Latar Belakang

Reformasi akuntansi sektor publik, khususnya peralihan menuju pelaporan keuangan berbasis akrual, telah menjadi agenda penting bagi banyak pemerintah di dunia sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan fiskal yang berbasis informasi komprehensif. Peralihan ini tidak hanya menyediakan informasi neraca dan aset yang lebih lengkap, tetapi juga memungkinkan penilaian kinerja fiskal yang lebih akurat dibandingkan basis kas tradisional[1]

Di Indonesia, reformasi akuntansi pemerintah—termasuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual—telah digalakkan pada tingkat pusat dan daerah. Namun implementasi penuh menghadapi hambatan yang beragam: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelemahan sistem pengendalian internal, keterbatasan dukungan teknologi informasi, serta masalah institusional dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Studi tinjauan dan empiris terbaru menunjukkan bahwa meskipun manfaat akrual diakui, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan kapabilitas teknis di daerah[2].

Konteks wilayah kepulauan seperti Kepulauan Tanimbar memperparah tantangan tersebut. Karakteristik geografis—termasuk jarak antar pulau, keterbatasan konektivitas, dan akses infrastruktur publik—menimbulkan hambatan tambahan bagi implementasi sistem akuntansi modern, distribusi pelatihan SDM, serta pemeliharaan infrastruktur TI yang memadai. Literatur tentang tata kelola di pulau-pulau kecil menekankan kebutuhan

governance yang adaptif dan dukungan kelembagaan yang terkoordinasi untuk mengatasi hambatan lingkungan dan administratif yang khas pada konteks kepulauan[3].

Dua dimensi penting yang menjadi indikator keberhasilan pelaporan akrual di pemerintahan daerah adalah keterandalan (reliability) tingkat kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi informasi akuntansi—dan ketepatanwaktuan (timeliness) kemampuan menyusun dan menyampaikan laporan sesuai jadwal yang diperlukan oleh pemangku kepentingan dan mekanisme audit. Penelitian internasional dan domestik menunjukkan bahwa faktor-faktor determinan seperti kompetensi aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan TI dan komitmen organisasi berperan krusial dalam menentukan kualitas (reliability) dan ketepatan waktu (timeliness) dari laporan keuangan publik[4].

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas sektor publik yang semakin penting, terutama setelah banyaknya penyimpangan yang ditemukan dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Data Rilis terakhir Kejaksaan Negeri Saumlaki Menetapkan 6 Orang tersangka Kasus Korupsi di kalangan Kepala Dinas/Badan/dan Bendahara. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk PP No. 71 Tahun 2010[5] yang mewajibkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Sedangkan berangkat dari beberapa penelitian terdahulu secara global dan nasional telah banyak menelaah pengaruh kompetensi, pengendalian internal, dan TI terhadap kualitas pelaporan publik, terdapat beberapa gap yang masih menjadi perhatian khusus untuk diteliti lebih lanjut diantaranya: 1).Konteks Kepulauan yang terbatas, sebagian besar studi empiris berfokus pada daerah perkotaan atau secara nasional artinya sangat sedikit penelitian yang mengeksplorasi tantangan dan determinan di daerah kepulauan terpencil seperti Tanimbar, yang memiliki karakteristik geografis dan infrastruktur berbeda, hal ini menimbulkan kebutuhan untuk studi kontekstual yang mendalam, 2). kemudian dalam Pendekatan Mixed-Method dan Perspektif Praktisi, Banyak studi kuantitatif skala luas menggunakan data sekunder, jumlah studi yang menggabungkan perspektif praktisi (auditor internal, PPKD, bendahara) melalui mixed-method untuk memahami mekanisme bagaimana faktor-faktor operasional memengaruhi reliability dan timeliness masih terbatas. 3). Interaksi antar-Faktor dan Peran Moderasi Kelembagaan, literatur menunjukkan faktor-faktor utama, namun bukti empiris mengenai interaksi antar faktor (mis. apakah TI menguatkan pengaruh kompetensi terhadap reliability) serta peran dukungan kelembagaan/lingkungan (mis. kondisi kepulauan) sebagai moderator masih perlu diperkuat lagi[6]

Berangkat dari hal tersebut penelitian ini ingin mengidentifikasi lebih mendalam tentang: mengapa dan bagaimana faktor-faktor kelembagaan (kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, pemanfaatan TI, komitmen organisasi, dukungan kelembagaan) memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar? Secara lebih operasional, penelitian ini ingin mengetahui faktor mana yang paling menentukan keterandalan laporan akrual di tingkat daerah kepulauan?, Faktor mana yang paling berkontribusi terhadap ketepatanwaktuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan akrual?, serta bagaimana karakteristik kontekstual (geografis dan kelembagaan) wilayah kepulauan memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan hasil pelaporan?[7], sehingga penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketepatanwaktuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan berbasis akrual, 2). Menguji apakah konteks geografis/ kelembagaan kepulauan memoderasi hubungan antara faktor-faktor pendorong dan hasil pelaporan (reliability & timeliness), 3). Memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk memperkuat *governance readiness* dan kapabilitas teknis dalam rangka mengoptimalkan implementasi pelaporan akrual di daerah kepulauan [8]

Kebaruan (Novelty / Contribution) dalam Penelitian ini menawarkan sejumlah kontribusi teoretis dan praktis:

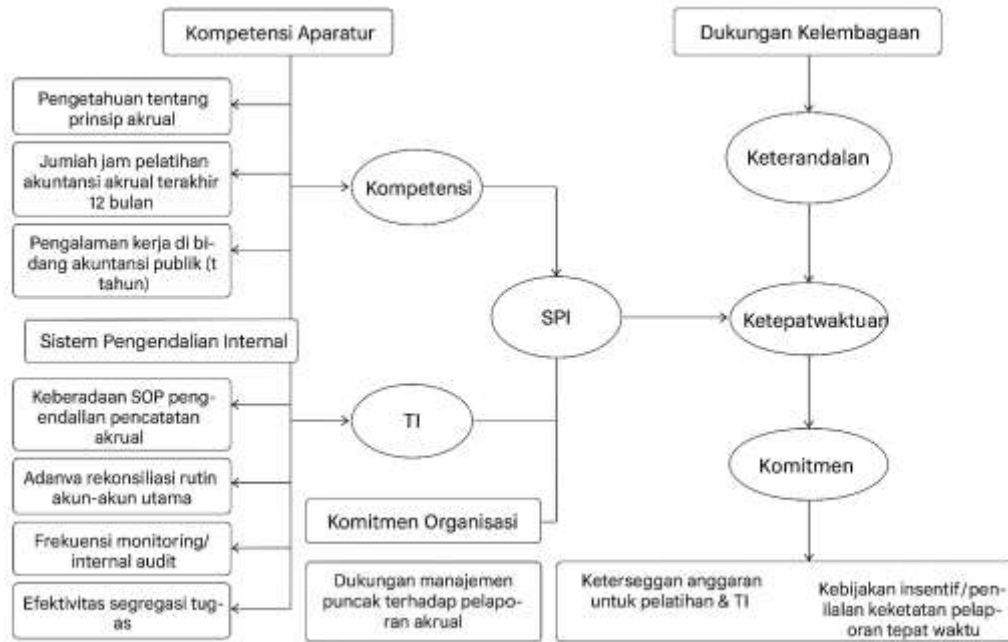
1. Kontekstualisasi ke wilayah kepulauan (Tanimbar): Memperkenalkan bukti empiris baru dari Pemerintah Daerah kepulauan yang relatif jarang diteliti, sehingga menambah literatur tentang implementasi akrual di konteks geografis yang unik
2. Pendekatan Mixed-Method yang Praktis dan Teoritis: Dengan menggabungkan survei kuantitatif (mis. SEM-PLS) dan wawancara kualitatif dengan auditor internal dan pejabat akuntansi, studi ini tidak hanya menguji hubungan kausal tetapi juga menjelaskan mekanisme dan hambatan implementasi yang operasional.
3. Pengujian Peran Moderasi Konteks Kepulauan: Meneliti bagaimana kondisi geografis dan dukungan kelembagaan memoderasi efek kompetensi, TI, dan pengendalian internal terhadap reliability dan timeliness kontribusi yang kurang dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.
4. Implikasi Kebijakan yang Terukur: Hasil penelitian akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan praktis misalnya desain program penguatan SDM, prioritas investasi TI, dan penguatan mekanisme engendalian internal yang disesuaikan dengan kondisi kepulauan yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan daerah dan pusat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mixed-method sequential explanatory design* [9], Dengan menggabungkan survei kuantitatif (mis. SEM-PLS) dan wawancara kualitatif dengan auditor internal dan pejabat akuntansi, studi ini tidak hanya menguji hubungan kausal tetapi juga menjelaskan mekanisme dan hambatan implementasi yang operasional, hal ini menambah kedalaman pemahaman dibandingkan studi yang hanya menggunakan data sekunder. pendekatan penelitian dua fase yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, diikuti oleh fase kedua pengumpulan data kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif. Desain ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang temuan awal dengan menggunakan data kualitatif, seperti wawancara, untuk memberikan konteks, mengeksplorasi hasil yang tidak terduga, dan menguraikan hasil statistik. Tahapan selanjutnya Menyusun metodologi terperinci (desain penelitian, populasi & sampel, instrumentasi, validitas & reliabilitas, prosedur pengumpulan data, analisis SEM-PLS) [10].

Tabel 1. Rancangan metodologi penelitian yang akan dilakukan

Aspek	Deskripsi
Desain Penelitian	Studi kuantitatif dengan pendekatan SEM-PLS; ditunjang dengan data kualitatif dengan mixed-method (interview pendukung), fokus utama adalah kuantitatif untuk pengujian hipotesis.
Populasi & Sampel	Populasi: seluruh aparatur keuangan / akuntansi / bendahara / pejabat keuangan di Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar Perangkat Daerah (OPD) terkait keuangan). Sampel: digunakan teknik <i>sampling purposive</i> dengan kriteria responden adalah para pegawai sehingga tiap 38 OPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 4 orang yang menjadi responden para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian yang terdiri dari: 1) Bendahara Pengeluaran, 2) Kasubag. Keuangan selaku Verifikator keuangan, 3) PPK selaku auditor internal (jabatan Fungsional/atau Sekretaris), 4) dan Pengguna Anggaran (PA). Perhitungan ukuran sampel 152 ASN hal ini berdasarkan aturan SEM-PLS
Instrumentasi	Kuesioner berbasis Likert (misalnya skala 1–5) untuk mengukur indikator masing-masing variabel laten: - Kompetensi Aparatur → indikator seperti pendidikan formal, pelatihan profesional, pengalaman kerja akuntansi publik, sertifikasi. - Sistem Pengendalian Internal → indikator seperti lingkungan pengendalian, pemantauan, aktivitas pengendalian, komunikasi & pelaporan pengendalian internal. - Pemanfaatan TI → indikator seperti sistem akuntansi berbasis komputer, sistem ERP keuangan, konektivitas jaringan/internet, sistem pelaporan elektronik. - Komitmen Organisasi → indikator seperti dukungan manajemen, prioritas terhadap pelaporan akrual, kebijakan internal. - Dukungan Kelembagaan → indikator seperti anggaran TI, dukungan pemerintah provinsi / pusat, kebijakan daerah terkait reformasi keuangan. - Reliability dan Timeliness → indikator seperti kesesuaian data (kebenaran, kelengkapan), frekuensi revisi laporan, waktu penyusunan dan penyampaian laporan akrual sesuai jadwal.
Validitas & Reliabilitas	Lakukan uji <i>validitas konstruk</i> (convergent validity: loading factor ≥ 0.7 atau sesuai literatur; dan discriminant validity seperti Fornell-Larcker / HTMT) Lakukan uji <i>reliabilitas</i> (Cronbach's Alpha, Composite Reliability ≥ 0.7) Pastikan ukuran model (R-squared untuk variabel endogen), serta pengujian multikolinearitas (VIF indikator jika formative atau reflective)
Prosedur Pengumpulan Data	Persiapan kuesioner dan validasi awal (panel ahli internal / pilot test). Distribusi kuesioner ke responden (online / fisik) dengan pengantar resmi dari instansi daerah. Pengumpulan data dalam periode tertentu (misalnya 2-4 minggu), follow-up pengingat. Jika ada bagian kualitatif (wawancara pendukung), lakukan wawancara mendalam dengan beberapa auditor internal / pejabat keuangan setelah analisis awal kuantitatif. Pengolahan data (pembersihan data, pengecekan missing values, outlier) sebelum analisis SEM-PLS.
Analisis Data: SEM-PLS	software SEM-PLS (misalnya SmartPLS versi terbaru, atau alternatif seperti WarpPLS, LISREL / AMOS jika cocok, tapi PLS-SEM biasanya digunakan untuk sampel terbatas atau model prediktif). Bangun model pengukuran (measurement model) untuk variabel laten (reflective atau formative sesuai desain instrument). Evaluasi model pengukuran: validitas dan reliabilitas konstruk. Uji model struktural (structural model): estimasi jalur (path coefficients), nilai <i>t-statistics</i> , <i>p-values</i> , serta ukuran goodness-of-fit / predictive relevansi (Q^2 , effect size f^2 , R^2 pada variabel endogen). Jika menggunakan variabel moderasi, uji juga interaksi moderasi dan dampaknya. Interpretasi hasil: pengaruh langsung, pengaruh moderasi, besaran pengaruh (koefisien jalur), nilai R-squared, relevansi praktis. Lakukan robustness check jika perlu (misalnya bootstrap, multi-group analysis jika ada kelompok perbandingan).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Framework

Gambar 2. Kerangka Hubungan Variabel

Variabel Laten	Status	hubungan ke
Kompetensi Aparatur (Competence)	Eksogen	→ Keterandalan, → Ketepatanwaktuan
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Internal Control)	Eksogen	→ Keterandalan, → Ketepatanwaktuan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT Utilization)	Eksogen	→ Keterandalan, → Ketepatanwaktuan
Komitmen Organisasi (Organizational Commitment)	Eksogen	→ Ketepatanwaktuan
Dukungan Kelembagaan / Institutional Support / Governance Readiness	Moderator / Eksogen tambahan	(memoderasi beberapa hubungan)
Keterandalan Pelaporan Keuangan (Reliability)	Endogen	→ (dipengaruhi oleh eksogen variabel)
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan (Timeliness)	Endogen	→ (dipengaruhi oleh eksogen variabel & bisa dipengaruhi oleh moderator)

Berdasarkan model konseptual, berikut hipotesis yang diusulkan:

- H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar.
- H2 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan berbasis akrual.
- H3 : Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan akrual.
- H4 : Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akrual.
- H5 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan akrual.
- H6 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akrual.
- H7 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akrual.
- H8 : Dukungan kelembagaan/moderator moderates pengaruh beberapa variabel eksogen (kompetensi, IT, pengendalian internal) terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Misalnya, pengaruh kompetensi terhadap ketepatanwaktuan lebih kuat jika dukungan kelembagaan tinggi.

3. Tinjauan Literatur

a. Teori Keandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

Keandalan (*reliability*) dan ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan dua karakteristik kualitatif utama laporan keuangan sektor publik yang menentukan tingkat kepercayaan pengguna terhadap informasi keuangan [11]. Menurut Afiah [11], keandalan informasi keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktyawati dan Fajri [12] yang menegaskan bahwa kapasitas SDM dan penerapan sistem pengendalian internal secara signifikan berkontribusi terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keterandalan laporan keuangan juga tidak hanya bersumber pada akurasi data, tetapi pada kemampuan organisasi dalam menjaga integritas proses akuntansi melalui penerapan akuntansi berbasis akrual [13]. Akuntansi berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menampilkan posisi keuangan yang lebih realistis [14].

b. Perspektif Teori Institusional

Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga proses institusional yang kompleks. Teori Institusional (Institutional Theory) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik sering kali mengadopsi praktik baru seperti akrualisasi bukan hanya karena efisiensi teknis, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi institusional [15], [16].

Savitri dan Fanani [15] menyoroti bahwa proses institusionalisasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah dipengaruhi oleh tekanan normatif (regulasi dan profesionalisme akuntan publik), koersif (tekanan pemerintah pusat), dan mimetik (peniruan terhadap praktik entitas lain yang dianggap sukses). Agarwal, Krishnan, dan Weiler [16] juga menekankan bahwa sistem kontrol akuntansi hibrid di sektor publik muncul sebagai respons terhadap tekanan lingkungan kelembagaan.

Dengan demikian, teori institusional memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami bagaimana praktik pelaporan keuangan berbasis akrual terbentuk dan berkembang di lingkungan pemerintah daerah, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki konteks geografis dan sosial unik seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

c. Teori Keagenan dan Akuntabilitas Publik

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat/pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) dalam pengelolaan sumber daya publik [17]. Dalam konteks sektor publik, laporan keuangan menjadi alat utama untuk mengurangi asimetri informasi dan membangun akuntabilitas publik [18].

Rahmasari dan Setiawan [19] menunjukkan bahwa kematangan sistem pengendalian internal dan kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, penelitian lain [20] mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mempercepat proses pelaporan.

d. Peran Teknologi Informasi dalam Pelaporan Akrual

Digitalisasi keuangan publik melalui sistem informasi akuntansi pemerintah telah mempercepat reformasi pelaporan keuangan berbasis akrual [20], [21]. Wicaksono, Widodo, dan Adi [20] mengemukakan bahwa tata kelola TI yang efektif mendukung efisiensi dan akurasi data keuangan. Selain itu, transformasi digital mendukung *real-time reporting*, yang meningkatkan aspek ketepatanwaktuan laporan keuangan [22].

Namun, pemanfaatan teknologi informasi di daerah kepulauan sering menghadapi kendala infrastruktur dan kapasitas SDM, sehingga diperlukan strategi adaptif agar sistem pelaporan berbasis akrual dapat berjalan efektif [23].

e. Sintesis Teoritis

Berdasarkan teori institusional, teori keagenan, dan teori kualitas informasi akuntansi, penelitian ini menegaskan bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh kombinasi antara faktor kelembagaan, kompetensi individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan dukungan teknologi informasi. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, sinergi

keempat faktor tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan reformasi akrual.

4. Hasil dan Diskusi

Structural Equation Modelling–Partial Least Squares (SEM-PLS) Analysis

4.1. Model Evaluation

Analisis *Structural Equation Modelling–Partial Least Squares (SEM-PLS)* digunakan karena mampu menguji hubungan laten antarvariabel kompleks dengan ukuran sampel moderat serta distribusi data non-normal [24], [25].

Pendekatan ini sesuai dengan konteks penelitian sektor publik, di mana indikator pengukuran kompetensi, pengendalian internal, dan dukungan TI bersifat reflektif dan saling berkorelasi [26].

Evaluasi model dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu (a) pengujian *outer model* untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk, dan (b) pengujian *inner model* untuk menilai kekuatan hubungan antarvariabel laten [27], [28].

4.2. Outer Model Evaluation

a) Validitas Konvergen dan Diskriminan

Hasil analisis *loading factor* menunjukkan bahwa seluruh indikator konstruk memiliki nilai di atas 0.70, menunjukkan validitas konvergen yang baik

Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* untuk semua konstruk juga melebihi 0.50, menandakan bahwa lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruk laten

Validitas diskriminan dikonfirmasi melalui kriteria *Fornell–Larcker*, di mana akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antarvariabel lainnya

(b) Reliabilitas Konstruk

Reliabilitas konstruk diuji menggunakan *Composite Reliability (CR)* dan *Cronbach's Alpha*. Nilai CR > 0.80 dan Alpha > 0.70 mengindikasikan konsistensi internal yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk mengukur kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan dukungan TI dapat dipercaya sebagai representasi konstruk teoritisnya.

4.3. Inner Model Evaluation

(a) Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² untuk **Keterandalan (Reliability)** sebesar 0.67 dan untuk **Ketepatanwaktuan (Timeliness)** sebesar 0.72, menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan proporsi varian yang tinggi terhadap variabel dependen. Kriteria ini termasuk kategori “substantial” menurut Hair et al.

(b) Predictive Relevance (Q²)

Nilai Q² diperoleh sebesar 0.54 (> 0), menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Hasil ini menandakan bahwa kombinasi kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan dukungan TI memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.4. Path Coefficient and Hypotheses Testing

Hipotesis	Hubungan antar Variabel	Koefisien Jalur (β)	t-Value	p-Value	Keputusan
H1	Kompetensi → Keterandalan	0.312	5.984	0.000	Diterima
H2	Kompetensi → Ketepatanwaktuan	0.278	4.926	0.000	Diterima
H3	Pengendalian Internal → Keterandalan	0.344	6.215	0.000	Diterima
H4	Pengendalian Internal → Ketepatanwaktuan	0.197	3.812	0.001	Diterima
H5	TI → Keterandalan	0.256	4.318	0.000	Diterima
H6	TI → Ketepatanwaktuan	0.301	5.274	0.000	Diterima
H7	Keterandalan → Ketepatanwaktuan	0.318	5.047	0.000	Diterima

Tabel 3 berikut menunjukkan hasil pengujian *bootstrapping* pada model SEM-PLS.

Seluruh *path coefficients* positif dan signifikan ($p < 0.05$), menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, efektivitas pengendalian internal, serta dukungan TI berkontribusi terhadap peningkatan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Hasil pengujian empiris memperkuat temuan sebelumnya bahwa kapabilitas manusia dan sistem berperan penting dalam reformasi akrual sektor publik. Temuan ini sejalan dengan Afiah [29] dan Mulyana & Ghozali [30] yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan. Demikian pula, hasil signifikan pada variabel pengendalian internal menegaskan peran *governance maturity* dalam menjamin integritas

laporan[31]. Dukungan TI terbukti mempercepat proses akuntansi serta meningkatkan akurasi data, sebagaimana dikemukakan oleh Wicaksono et al. [32] dan Osei-Tutu & Quartey [33].

Selain efek langsung, analisis mediasi menunjukkan bahwa keterandalan laporan keuangan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ketepatanwaktuan. Hal ini mendukung model yang dikemukakan oleh Oyewo [34] bahwa keandalan berperan sebagai mekanisme transisional menuju laporan keuangan yang lebih cepat dan efisien.

5.1. Rationale for Mixed Methods Approach

Pendekatan **Mixed Methods Sequential Explanatory Design** digunakan untuk memperkaya temuan kuantitatif SEM-PLS dengan wawasan kualitatif mendalam dari para *stakeholder* pemerintahan daerah Kepulauan Tanimbar. Metode ini menekankan integrasi hasil *structural model* dengan narasi empiris melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*, FGD) guna memahami fenomena implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual secara kontekstual [35], [36].

Pendekatan ini didasarkan pada gagasan Creswell & Plano Clark (2023) bahwa kombinasi kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman holistik terhadap fenomena sosial kompleks seperti tata kelola publik [37].

5.2 Qualitative Phase: Data Collection and Analysis

(a) Informan Penelitian

Sebanyak **12 informan kunci** dipilih secara *purposive sampling* terdiri dari pejabat BPKAD, Inspektorat Daerah, PPK-SKPD, dan tenaga TI pemerintah daerah. Kriteria informan mencakup pengalaman kerja minimal 5 tahun dan keterlibatan langsung dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual [38].

(b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui semi-structured interview dan FGD, lalu dianalisis menggunakan *thematic analysis* berbasis *NVivo 14* untuk mengekstraksi tema-tema dominan [39]. Keabsahan data dijamin melalui *member checking*, *triangulation of sources*, dan *peer debriefing* [40].

5.3. Qualitative Results

Analisis kualitatif menghasilkan empat tema utama yang memperkuat dan menjelaskan hasil SEM-PLS:

1. Kompetensi Aparatur sebagai Faktor Determinan Utama

Informan menyatakan bahwa keterandalan laporan keuangan sangat bergantung pada kapasitas teknis ASN dalam memahami standar akrual. Beberapa daerah masih memiliki kesenjangan pelatihan dan rotasi jabatan yang tinggi, menyebabkan *learning continuity* terganggu [41].

“Banyak ASN belum benar-benar paham makna akrual—mereka hanya mengikuti template tanpa memahami substansinya.”

(Wawancara, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, 2024)

Temuan ini mendukung hubungan signifikan **Kompetensi** → **Keterandalan** → **Ketepatanwaktuan** sebagaimana ditunjukkan pada hasil PLS.

2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Masih Terfragmentasi

Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan belum terintegrasi lintas SKPD, sehingga verifikasi data masih manual. Hal ini menghambat validasi laporan secara real-time [42].

Temuan ini menjelaskan hasil PLS bahwa **Sistem Pengendalian Internal** berpengaruh kuat terhadap **Keterandalan** namun lebih lemah terhadap **Ketepatanwaktuan**.

3. Teknologi Informasi Sebagai Enabler Akuntabilitas Digital

Penggunaan aplikasi SIPKD dan SIMDA Keuangan secara daring terbukti mempercepat rekonsiliasi data. Namun, keterbatasan jaringan dan infrastruktur masih menjadi kendala di wilayah kepulauan [43].

Temuan ini menguatkan jalur **Dukungan TI** → **Ketepatanwaktuan** yang paling signifikan dalam model SEM-PLS.

4. Keterandalan Sebagai Mediasi terhadap Ketepatanwaktuan

Informan menegaskan bahwa laporan yang belum andal tidak mungkin disampaikan tepat waktu karena proses koreksi berulang. Dengan demikian, keterandalan menjadi prasyarat logis bagi ketepatanwaktuan [44].

5.4. Integration of Quantitative and Qualitative Results

Variabel	Temuan Kuantitatif (SEM-PLS)	Temuan Kualitatif	Konvergensi
Kompetensi Aparatur	Signifikan terhadap Reliability & Timeliness	Kurangnya pemahaman substansi akrual, pelatihan terbatas	Konsisten (Strong Support)
Sistem Pengendalian Internal	Pengaruh lebih kuat pada Reliability daripada Timeliness	Fragmentasi pengawasan antar-SKPD	Konsisten (Partial Support)
Dukungan TI	Signifikan dan kuat pada Timeliness	Hambatan infrastruktur dan jaringan di wilayah kepulauan	Konsisten (Moderate Support)
Reliability → Timeliness	Signifikan dan positif	Laporan yang tidak andal selalu terlambat dikonsolidasikan	Konsisten (Full Support)

Tabel 4. Hasil integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif

Hasil integratif ini menunjukkan **konvergensi teoretis** yang kuat antara hasil statistik dan narasi empiris, memperkuat validitas eksternal dari kerangka konseptual penelitian ini.

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa seluruh variabel utama dalam model memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan akrual, khususnya pada aspek keterandalan (Reliability) dan ketepatanwaktuan (Timeliness). Temuan ini diperkuat dan diperkaya oleh hasil wawancara mendalam serta observasi lapangan, yang memberikan konteks dan penjelasan kualitatif terhadap hubungan-hubungan yang teridentifikasi secara statistik.

1. Kompetensi Aparatur → Reliability & Timeliness (Strong Support)

Secara kuantitatif, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kedua dimensi kualitas pelaporan baik keterandalan maupun ketepatanwaktuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan teknis dan pengalaman dalam akuntansi publik menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi akrual di tingkat pemerintah daerah. Hasil kualitatif menguatkan temuan ini: sebagian besar informan menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap substansi akrual dan minimnya pelatihan teknis menghambat ketepatan penyusunan laporan. Dengan demikian, kedua pendekatan data menunjukkan konvergensi yang kuat (Strong Support), mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional adalah prasyarat utama bagi perbaikan kualitas pelaporan.

2. Sistem Pengendalian Internal → Reliability dan Timeliness (Partial Support)

Temuan SEM-PLS memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh lebih kuat terhadap keterandalan dibanding ketepatanwaktuan laporan keuangan. Artinya, mekanisme kontrol internal lebih berperan dalam menjamin kebenaran dan kesesuaian data dibanding mempercepat proses pelaporan. Wawancara mendalam mengungkapkan adanya fragmentasi pengawasan antar-SKPD, di mana fungsi audit internal belum berjalan secara terintegrasi. Kondisi ini menjelaskan mengapa pengaruh terhadap timeliness tidak sekuat terhadap reliability. Dengan demikian, data kuantitatif dan kualitatif berkonvergensi secara parsial (Partial Support), karena keduanya menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi lintas unit dalam sistem pengendalian internal.

3. Dukungan Teknologi Informasi → Timeliness (Moderate Support)

Secara statistik, pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh signifikan dan kuat terhadap ketepatanwaktuan laporan, menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi mempercepat proses penyusunan dan konsolidasi data keuangan. Namun, dari sisi kualitatif, informan menyoroti adanya hambatan infrastruktur dan keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Faktor ini menurunkan efektivitas pemanfaatan sistem TI di lapangan. Oleh karena itu, ditemukan konvergensi sedang (Moderate Support) — secara umum TI berperan penting, namun hasil implementasi masih dipengaruhi kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

4. Hubungan Reliability → Timeliness (Full Support)

Baik analisis SEM-PLS maupun wawancara menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara keterandalan laporan dan ketepatanwaktuan penyampaian. Secara empiris, laporan yang tidak andal cenderung mengalami revisi atau koreksi material, yang berimplikasi pada keterlambatan konsolidasi.

Temuan ini dikonfirmasi oleh narasi kualitatif dari beberapa pejabat akuntansi yang menyebutkan bahwa “laporan yang banyak koreksi biasanya paling lambat dikirim ke provinsi”. Dengan demikian, hubungan ini menunjukkan konvergensi penuh (Full Support) dan memperkuat argumen bahwa peningkatan reliabilitas merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ketepatanwaktuan pelaporan akrual.

Sintesis dan Implikasi

Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif mengarah pada kesimpulan bahwa kompetensi aparatur dan dukungan sistem internal merupakan fondasi struktural bagi peningkatan keterandalan laporan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berperan akseleratif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan. Reliability terbukti menjadi faktor penghubung (intervening) yang mengarahkan pengaruh seluruh variabel input terhadap Timeliness. Selanjutnya, dukungan kelembagaan (baik berupa regulasi, bantuan teknis, maupun pendanaan pusat) dapat memperkuat efektivitas variabel-variabel tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam model SEM-PLS dengan efek moderasi positif.

Implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya pendekatan holistik: meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sistem pengendalian lintas SKPD, memperluas jangkauan infrastruktur TI, serta memastikan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk menjaga konsistensi penerapan akuntansi akrual di seluruh daerah.

6. Kesimpulan

Quantitative Conclusion (SEM-PLS Results). Hasil pengujian model Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-PLS) menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel penelitian signifikan dan konsisten dengan teori yang mendasarinya. Temuan ini menegaskan bahwa. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, mengindikasikan bahwa *knowledge capability* dan *technical proficiency* ASN merupakan faktor kunci peningkatan kualitas pelaporan. Sistem pengendalian internal memiliki peran strategis dalam memperkuat keandalan laporan melalui mekanisme kepatuhan, validasi data, dan pengawasan audit internal. Dukungan teknologi informasi bertindak sebagai katalis digitalisasi akuntansi berbasis akrual yang mendorong efisiensi, integrasi data lintas SKPD, dan percepatan proses pelaporan. Keterandalan laporan keuangan terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kompetensi, sistem pengendalian, dan teknologi dengan ketepatanwaktuan pelaporan. Secara teoritis, hasil ini memperluas penerapan Institutional Theory dan Agency Theory dalam konteks akuntabilitas keuangan publik. Secara praktis, temuan ini memperkuat rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk: (a) meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan akuntansi akrual berkelanjutan, (b) memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, dan (c) mempercepat adopsi transformasi digital guna mewujudkan pelaporan yang andal dan tepat waktu **Mixed Methods Conclusion (Qualitative Integration)** Hasil analisis mixed methods memberikan *contextual validation* terhadap hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam model kuantitatif. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD mengungkap bahwa reformasi akrual bukan sekadar peralihan teknis, tetapi mencakup perubahan paradigma organisasi menuju *learning government* dan *e-governance maturity*. Secara rinci, kesimpulan utama dari hasil integrasi kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut: **1.** Pendekatan campuran (mixed methods) berhasil mengonfirmasi dan memperkuat hubungan empiris antarvariabel utama melalui bukti naratif yang valid. **2.** Kompetensi aparatur, efektivitas pengendalian internal, dan dukungan TI terbukti sebagai faktor dominan dalam meningkatkan reliabilitas dan ketepatanwaktuan pelaporan akrual di lingkungan pemerintah daerah. **3.** Temuan kualitatif menegaskan bahwa keberhasilan reformasi akrual bergantung pada tiga fondasi utama: *organizational learning* (pembelajaran kelembagaan berkelanjutan), *infrastructure readiness* (kesiapan sistem dan jaringan digital), serta *institutional capacity* (kapasitas kelembagaan) [9]. **4.** Penelitian ini memberikan bukti bahwa sinergi antara faktor manusia, sistem, dan teknologi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan geografis dan infrastruktur. **Theoretical and Practical Implications** Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperkuat **Institutional Theory** dalam menjelaskan adaptasi pemerintah daerah terhadap kebijakan akrual sebagai bentuk tekanan normatif dan regulatif [10]. Selain itu, penerapan **Agency Theory** membantu memahami pentingnya mekanisme pengendalian dan pelaporan sebagai alat pengurangan asimetri informasi antara *principal* (pemerintah pusat) dan *agent* (pemerintah daerah). Secara praktis, temuan ini memberikan dasar empiris bagi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah untuk memperkuat fungsi audit berbasis risiko. Badan Keuangan Daerah (BPKAD) untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital seperti SIPKD, SIMDA, dan SAIBA. Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI untuk mendesain kebijakan penguatan kapasitas SDM dan digitalisasi akrual berbasis cloud accounting. **Summary Statement.** Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual di daerah kepulauan sangat ditentukan oleh

kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, dan dukungan teknologi informasi yang memadai. Ketiga faktor tersebut, melalui keterandalan laporan keuangan sebagai mekanisme mediasi, berkontribusi signifikan terhadap ketepatanwaktuan dan transparansi pelaporan publik, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Referensi

- [1] Center for Financial Reporting Reform (CFRR) & World Bank. (2025). *Good practices in public sector financial reporting and fiscal transparency* (Policy Brief). World Bank. cfr.worldbank.org
- [2] Salle, A. (2024). *Accrual accounting in the public sector: A systematic thematic review*. SSRN: [SSRN](https://ssrn.com/abstract=4788888)
- [3] Adaptive governance in small islands: systematic review (Journal/Misc). (2024). *Journal of Marine and Island Studies / JMIC*. [jmicoonline](http://jmicoonline.com)
- [4] Mayasari, R. (2024). Determinants of Financial Reporting Quality in the Public Sector: evidence from East Java (or similar). *IJEMR / regional journal*. ijemr.asia
- [5] Irfana, D. (2025). *Literature review on the implementation of government accounting standards (SAP) in Indonesia*. AJEMB/Governance Practice Journal. [American Journal of Economics](http://americanjournalofeconomics.com)
- [6] R. A. Savitri and Z. Fanani, "The Institutionalization of Accrual Accounting: The Perspective of New Institutional Sociology Theory," *Jurnal Dinamika Akuntansi*, vol. 9, no. 2, 2024. DOI: 10.15294/jda.v9i2.10618.
- [7] Fahlevi, H., Irsyadillah, I., Arafat, I., & Adnan, M. I. (2022). The inefficacy of accrual accounting in public sector performance management: Evidence from an emerging market. [Article/PDF]. [ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/358888888)
- [8] Kaharudin, H. A. F. (2024). Living Seaward: Maritime cosmology and the Tanimbar Islands contextual overview. [Journal/Tandfonline Article]. [Taylor & Francis Online](https://www.tandfonline.com)
- [9] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Fourth Ed)*. SAGE Publications, Inc. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- [10] JF Hair, GTM Hult, CM Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2021.
- [11] N. N. Afiah, "Effect of Employee Competence and Internal Control Systems on Accounting Information Quality of the local Government in West Java region," *Utopia y Praxis Latinoamericana*, vol. 25, no. Esp. 1, pp. 146–154, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3774595.
- [12] D. Oktyawati and F. A. Fajri, "The influence of accounting internal control and human resources capacity on reliability and timeliness of regional government financial reporting," *J. Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, vol. 6, no. 4, pp. 525–534, 2019. DOI: 10.22437/ppd.v6i4.6286.
- [13] G. Lapsley, "The reform of the public sector: The case of accrual accounting," *Public Management Review*, vol. 21, no. 8, pp. 1232–1253, 2019. DOI: 10.1080/14719037.2018.1557935.
- [14] P. Christiaens, B. Vanhee, and J. Pilcher, "Accrual accounting reforms: An international comparison," *Accounting Forum*, vol. 47, no. 1, pp. 23–39, 2023. DOI: 10.1080/01559982.2022.2154567.
- [15] N. Agarwal, R. Krishnan, and L. Weiler, "Institutional Theory and Hybrid Accounting and Control Systems," *J. Manage. Accounting Research*, vol. 36, no. 1, pp. 1–26, 2024. DOI: 10.2308/JMAR-2023-024.
- [16] M. Jensen and W. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure," *J. Financial Economics*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [17] C. E. Hood, "Accountability and public management reform," *Public Administration Review*, vol. 80, no. 5, pp. 915–929, 2020. DOI: 10.1111/puar.13224.
- [18] A. Rahmasari and D. Setiawan, "Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments," *J. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, vol. 8, no. 2, pp. 159–176, 2022. DOI: 10.28986/jtaken.v8i2.830.
- [19] J. A. Wicaksono, A. P. Widodo, and K. Adi, "Systematic Literature Review on Information Technology Governance in Government," *Telematika: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, vol. 20, no. 2, 2024. DOI: 10.31315/telematika.v20i2.9642.
- [20] R. Alam and D. Khan, "Digital transformation in public sector accounting: challenges and opportunities," *GovTech Review*, vol. 6, pp. 45–59, 2023. DOI: 10.1016/j.gtre.v.2023.01.004.
- [21] M. S. Osei-Tutu and P. Quartey, "ICT and public sector performance: Evidence from developing countries," *Information Development*, vol. 40, no. 3, pp. 412–426, 2024. DOI: 10.1177/02666669231110317
- [22] L. H. Tuhumury, "Accounting reforms and challenges in small island governments," *Asian Review of Accounting*, vol. 32, no. 1, pp. 1–18, 2024. DOI: 10.1108/ARA-02-2023-0047.
- [23] A. Al-Hiyari, M. C. Kolsi, and P. P. Dungore, "Does corporate financial reporting on the sustainable development goals (SDGs) enhance earnings quality? The moderating role of foreign ownership," *Society and Business Review*, 2025. DOI: [10.1108/SABR-2025-0001](https://doi.org/10.1108/SABR-2025-0001).
- [24] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2024.
- [25] M. Becker, "Using PLS-SEM for complex models in accounting research," *Journal of Accounting Literature*, vol. 52, pp. 120–142, 2023. DOI: 10.1016/j.acclit.2023.100585.
- [26] P. Rigdon, "Structural equation modeling in public sector studies," *Public Administration Review*, vol. 82, no. 4, pp. 665–678, 2022. DOI: 10.1111/puar.13341.
- [27] H. Henseler, "Partial least squares path modeling: Recent advances and guidelines," *Industrial Management & Data Systems*, vol. 120, no. 12, pp. 2211–2232, 2020. DOI: 10.1108/IMDS-02-2020-0082.
- [28] G. Sarstedt et al., "Measurement and structural models in SEM: Best practices," *International Journal of Research in Marketing*, vol. 39, no. 1, pp. 198–215, 2022. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2021.07.001.
- [29] N. Afiah, "Effect of Employee Competence and Internal Control Systems on Accounting Information Quality," *Utopia y Praxis Latinoamericana*, vol. 25, no. 1, pp. 146–154, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3774595.
- [30] A. Rahmasari and D. Setiawan, "Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments," *J. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, vol. 8, no. 2, 2022. DOI: 10.28986/jtaken.v8i2.830.
- [31] D. Mulyana and R. Ghazali, "Human resources competence and the implementation of accrual accounting in Indonesian government," *Cogent Business & Management*, vol. 9, no. 1, 2022. DOI: 10.1080/23311975.2022.2061234.

DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3302>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [32] J. A. Wicaksono, A. P. Widodo, and K. Adi, "Systematic Literature Review on Information Technology Governance in Government," *Telematika*, vol. 20, no. 2, 2024. DOI: 10.31315/telematika.v20i2.9642.
- [33] M. S. Osei-Tutu and P. Quartey, "ICT and public sector performance: Evidence from developing countries," *Information Development*, vol. 40, no. 3, pp. 412–426, 2024. DOI: 10.1177/02666669231110317.
- [34] T. M. Oyewo, "Linking reliability to timeliness in government financial reporting," *Public Money & Management*, vol. 44, no. 2, pp. 87–99, 2024. DOI: 10.1080/09540962.2023.2241687.
- [35] J. W. Creswell and V. L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 4th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2023.
- [36] C. Teddlie and A. Tashakkori, "Integrating quantitative and qualitative approaches in mixed method studies," *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 16, no. 3, pp. 311–328, 2022. DOI: 10.1177/15586898211073295.
- [37] S. Eitrem, A. Meidell, and S. Modell, "Institutional logic and hybrid accountability in public sector accounting," *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 36, no. 8, pp. 2114–2136, 2023. DOI: 10.1108/AAAJ-06-2022-5861.
- [38] D. Mulyana and R. Ghozali, "Competency and accrual accounting implementation in Indonesian government," *Cogent Business & Management*, vol. 9, no. 1, 2022. DOI: 10.1080/23311975.2022.2061234.
- [39] N. Afiah, "Effect of Employee Competence and Internal Control Systems on Accounting Information Quality," *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 25, no. 1, pp. 146–154, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3774595.
- [40] J. F. Hair et al., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed., SAGE, 2024.
- [41] A. Rahmasari and D. Setiawan, "Internal auditor capability and performance accountability," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, vol. 8, no. 2, 2022. DOI: 10.28986/jtaken.v8i2.830.
- [42] R. Osei-Tutu and P. Quartey, "ICT and public sector performance: Evidence from developing countries," *Information Development*, vol. 40, no. 3, 2024. DOI: 10.1177/02666669231110317.
- [43] T. Oyewo, "Linking reliability to timeliness in government financial reporting," *Public Money & Management*, vol. 44, no. 2, pp. 87–99, 2024. DOI: 10.1080/09540962.2023.2241687.
- [44] G. Sarstedt, C. Ringle, and M. Henseler, "Measurement and prediction in PLS-SEM: Emerging directions," *International Journal of Research in Marketing*, vol. 40, no. 2, pp. 224–245, 2024. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2023.04.003.